

DAFTAR PUSTAKA

Buku / Literatur

Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta:

Konstitusi Press.

H. M., I. (2000). *ed. Buku Pintar (Seri Senior), cet 28, hlm 7*. Jakarta: Upaya Warga

Negara.

H.S., S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermawan, F. I. (1986). *Perkembangan Kegiatan Maritim Sebuah Pengantar Studi*

Ilmu Maritim, hlm. 4. Bandung: Alumni.

Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russel.

Martono, H. (2008). *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang*

Nomor 17 Tahun 2008. Jakarta: Rajawali Press.

Muchsan. (2000). *Hukum Perkapalan Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

R. P., S. (2005). *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut,*

edisi ketiga. Jakarta: PPM.

Shadily, H. (2001). *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve &

Elsevier Publishing Projects.

Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1985). *Penulisan Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

Singkat. Jakarta: CV. Rajawali.

Soekardono. (1981). *Hukum Perkapalan Indonesia*, hlm 3. Jakarta: Dian Rakyat.

Suherman, E. (2000). *Aneka Masalah Hukum Kedingrintaraan*. Bandung: Mandar

Maju.

Artikel Jurnal

Andry, M. A., & Febri, Y. (2014). Implementasi Kebijakan Keselamatan Pelayaran.

Jurnal Administrasi Pembangunan Vol. 2, No. 3, 227-360.

Kizza, B. (1980). Liability of Air Carrier for Injuries to Passengers Resulting From

Domestic Hijacking and Related to Incidents. *JALC 151 Vol. 46*, 1.

Thamrin, H. (2015). Manajemen Keselamatan Maritim dan Upaya Pencegahan

Kecelakaan Kapal ke Titik Nol (Zero Accident). *Jurnal Ilmiah WIDYA Vol.*

3, No. 2, 112.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3724).*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang
Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227).*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 Tentang
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3724)*

*Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 55 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108).

Peraturan Ketua Mahkamah Pelayaran Nomor : HK.208/01/XI/MP.2015 tentang Prosedur Tetap Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal.

Instrumen Hukum Internasional

Safety of Life at Sea (SOLAS), Consolidated Edition, Fourth Edition International Maritime Organization. (2004).

Marine Guidance Note 564 (M +F). (2012).

Laporan

Pelayaran, K. S. (2016). *Data Investigasi Kecelakaan Pelayaran Tahun 2010-2016*. Jakarta: Media Release KNKT.

R., A. E. (2005). *Laporan Akhir Tim Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yurisdiksi dan Kompetensi Mahkamah Pelayaran*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Martono, H. (2008). *Transportasi di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*. Jakarta: Rajawali Press.

Internet

(2018, Mei 22). Diambil kembali dari Hukumonline:
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt583bc2a0cfc09/kementerian-perhubungan-akan-bentuk-pengadilan-maritim>

(2018, Maret 13). Diambil kembali dari Hukumonline:
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt589ac0871a9c5/mengenal-pengadilan-profesi-para-pelaut>

(2018, Juni 6). Diambil kembali dari Hukumonline:
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt589822904c131/regulasi-transportasi-laut-sudah-cukupkah-melindungi-konsumen>